



Kepemimpinan Melayu dalam Peribahasa

Elmustian^{1*}, Hermandra², Yusron Hadi Falah³

^{1,2,3} Magister Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP, Universitas Riau

*Penulis Korespondensi: elmustian@lecturer.unri.ac.id, hermandra@lecturer.unri.ac.id,
hadifalah04@gmail.com

Abstract. *This study aims to examine the values of Malay leadership reflected in proverbs, particularly the expression “a just ruler is obeyed, an unjust ruler is opposed.” In Malay culture, leadership is not merely understood as formal authority but also as a moral responsibility grounded in tradition, religion, and wisdom. This research employs a descriptive qualitative method using a literature review approach by collecting data from journals, articles, and other relevant academic sources. The findings reveal that Malay proverbs contain essential leadership values such as justice, trustworthiness, reciprocal relationships between leaders and the people, rejection of tyranny, and the importance of moral and ethical conduct. Furthermore, these proverbs reflect social and cultural values emphasizing consensus and harmony in society. Therefore, Malay proverbs function not only as linguistic expressions but also as guidelines for shaping ideal leadership character. These values remain relevant in modern contexts as a foundation for fostering just, wise, and responsible leadership*

Keywords: *malay proverbs, leadership values, justice, moral responsibility, cultural wisdom*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji nilai-nilai kepemimpinan Melayu yang terkandung dalam peribahasa, khususnya ungkapan “raja adil raja disembah, raja zalim raja disanggah”. Kepemimpinan dalam budaya Melayu tidak hanya dipahami sebagai kekuasaan formal, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral yang berlandaskan nilai adat, agama, dan kebijaksanaan hidup. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik studi kepustakaan, melalui pengumpulan data dari jurnal, artikel, serta sumber ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peribahasa Melayu mengandung nilai-nilai utama kepemimpinan, seperti keadilan, amanah, hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat, penolakan terhadap kezaliman, serta pentingnya moral dan etika. Selain itu, peribahasa juga mencerminkan nilai sosial dan budaya yang menekankan musyawarah dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, peribahasa Melayu tidak hanya berfungsi sebagai ungkapan bahasa, tetapi juga sebagai pedoman dalam membentuk karakter kepemimpinan yang ideal. Nilai-nilai tersebut tetap relevan dalam kehidupan modern sebagai dasar dalam menciptakan kepemimpinan yang adil, bijaksana, dan bertanggung jawab.

Kata kunci: peribahasa Melayu, kepemimpinan, keadilan, amanah, nilai budaya

1. LATAR BELAKANG

Kepemimpinan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat karena berperan dalam mengatur, mengarahkan, serta menjaga keharmonisan sosial. Dalam masyarakat Melayu, konsep kepemimpinan tidak hanya dipahami sebagai kemampuan memimpin secara formal, tetapi juga berkaitan dengan nilai moral, adat istiadat, agama, dan kebijaksanaan hidup yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam berbagai bentuk kebudayaan Melayu, seperti peribahasa, selain itu juga aa tunjuk ajar, sastra lisan, sastra klasik, dan sastra modern. Melalui karya-karya tersebut, masyarakat Melayu menanamkan ajaran tentang karakter pemimpin yang

ideal, seperti bijaksana, adil, amanah, berwibawa, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Peribahasa Melayu juga mengandung banyak petuah yang menggambarkan sikap dan perilaku seorang pemimpin. Ungkapan seperti “raja adil raja disembah, raja zalim raja disanggah” menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam budaya Melayu sangat menekankan keadilan dan tanggung jawab moral. Selain itu, tunjuk ajar Melayu berfungsi sebagai pedoman etika dan tata kehidupan yang memberikan nasihat mengenai hubungan antara pemimpin dan masyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi cerminan identitas budaya Melayu yang menjunjung tinggi kesantunan, musyawarah, dan kebijaksanaan dalam memimpin.

Di sisi lain, sastra lisan Melayu, seperti cerita rakyat, gurindam dua belas, pantun, dan syair, juga banyak memuat gambaran tentang tokoh-tokoh pemimpin yang dijadikan teladan oleh masyarakat. Tokoh-tokoh tersebut biasanya digambarkan memiliki sifat arif, bijaksana berani, dan dekat dengan rakyat. Dalam sastra klasik Melayu, konsep kepemimpinan lebih banyak dikaitkan dengan sistem kerajaan dan nilai-nilai Islam yang memengaruhi kehidupan masyarakat Melayu. Hikayat-hikayat klasik menghadirkan gambaran pemimpin ideal yang mampu menjaga kehormatan negeri dan kesejahteraan rakyatnya.

Perkembangan zaman sekarang juga melahirkan sastra modern yang turut mengangkat tema kepemimpinan dalam konteks kehidupan masyarakat kontemporer. Sastra modern tidak hanya menggambarkan kepemimpinan yang ideal, tetapi juga menghadirkan kritik terhadap penyimpangan kekuasaan, ketidakadilan sosial, dan krisis moral pemimpin. Hal ini menunjukkan bahwa konsep kepemimpinan Melayu terus berkembang mengikuti dinamika sosial masyarakat tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya yang menjadi dasarnya.

Penelitian mengenai kepemimpinan Melayu dalam peribahasa, tunjuk ajar, sastra lisan, sastra klasik, dan sastra modern menjadi penting dilakukan karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai kepemimpinan yang diwariskan dalam budaya Melayu. Selain itu, penelitian ini juga relevan sebagai upaya pelestarian budaya serta penguatan karakter kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Dengan demikian, kajian ini

diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu sastra, budaya Melayu, serta pendidikan karakter bagi masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, mendeskripsikan, dan menginterpretasikan nilai-nilai kepemimpinan Melayu yang terdapat dalam peribahasa, tunjuk ajar, sastra lisan, sastra klasik, dan sastra modern. Pendekatan deskriptif dipilih agar data yang diperoleh dapat dijelaskan secara mendalam sesuai dengan konteks budaya Melayu. Data penelitian ini diperoleh melalui teknik studi kepustakaan berbasis sumber, yaitu dengan mengumpulkan referensi dari jurnal ilmiah, artikel, dan sumber terpercaya yang relevan dengan kajian kepemimpinan Melayu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005), peribahasa didefinisikan sebagai ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap serta mengandung pengertian tertentu yang mencerminkan kebudayaan suatu masyarakat. Definisi ini menegaskan bahwa peribahasa bukan sekadar rangkaian kata biasa, melainkan bentuk ekspresi bahasa yang sarat makna, nilai, dan pengalaman hidup kolektif masyarakat yang melahirkannya. Sementara itu, menurut Wiktionary, peribahasa juga diartikan sebagai ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan tetap dan mengandung makna tertentu, seperti bidal, pepatah, dan ungkapan lainnya. Kedua pengertian ini menunjukkan bahwa peribahasa memiliki fungsi penting sebagai media penyampai nilai, norma, dan kebijaksanaan hidup secara turun-temurun.

Sebagian besar peribahasa Melayu disampaikan dalam bentuk sindiran halus, perumpamaan, atau ungkapan yang mengandung nasihat. Hal ini mencerminkan karakter masyarakat Melayu yang menjunjung tinggi kesopanan, kehalusan budi, serta kebijaksanaan dalam berkomunikasi. Melalui peribahasa, nasihat tidak disampaikan secara langsung atau keras, melainkan dibungkus dengan bahasa kias yang indah sehingga lebih mudah diterima tanpa menyinggung perasaan. Dengan demikian, peribahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana pendidikan moral dan pembentukan karakter.

Salah satu peribahasa Melayu yang sangat terkenal adalah “raja adil raja disembah, raja zalim raja disanggah”. Ungkapan ini menggambarkan pandangan masyarakat Melayu terhadap konsep kepemimpinan yang ideal. Peribahasa ini mengandung makna bahwa seorang pemimpin yang bersikap adil, bijaksana, serta mengutamakan kepentingan rakyat akan memperoleh penghormatan, kesetiaan, dan dukungan dari masyarakatnya. Sebaliknya, pemimpin yang bersifat zalim, sewenang-wenang, dan mengabaikan kesejahteraan rakyat akan menghadapi penolakan, bahkan perlawanan dari orang-orang yang dipimpinnya.

Dalam konteks budaya Melayu, istilah “raja” tidak hanya dimaknai sebagai penguasa dalam sistem kerajaan semata, tetapi juga memiliki makna yang lebih luas sebagai simbol kepemimpinan. Kata ini dapat merujuk pada siapa saja yang memiliki kekuasaan atau tanggung jawab memimpin, baik dalam pemerintahan, organisasi, maupun dalam lingkungan sosial. Sementara itu, kata “disembah” tidak berarti disembah dalam arti harfiah seperti penyembahan, melainkan dimaknai sebagai bentuk penghormatan yang tinggi, ketaatan, dan pengakuan atas kewibawaan pemimpin tersebut. Adapun kata “disanggah” berarti ditentang, tidak diikuti, atau bahkan dilawan karena dianggap tidak layak atau tidak adil dalam menjalankan kepemimpinannya.

Peribahasa ini mencerminkan beberapa nilai utama kepemimpinan Melayu, yaitu:

1. Nilai Keadilan

Dalam kitab Tsamarat al-Muhimmah, Raja Ali Haji menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus memenuhi sejumlah syarat, baik yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Syarat lahiriah tersebut meliputi beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, serta memiliki kemampuan berbicara, mendengar, dan melihat dengan baik. Sekilas, syarat-syarat ini tampak hanya berkaitan dengan aspek fisik. Namun, sebenarnya di dalamnya terkandung makna filosofis yang mendalam. Syarat beragama Islam, misalnya, tidak hanya dimaknai sebagai identitas formal, tetapi juga menuntut seorang pemimpin untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai moral Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, seorang pemimpin harus mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam setiap tindakan dan kebijakannya. Keputusan yang diambil harus didasarkan pada pemikiran yang matang, karena pemimpin memiliki tanggung jawab besar terhadap

masyarakat yang dipimpinnya. Hal ini sejalan dengan ungkapan Melayu, “*orang beradab bertanggung jawab*” (Effendy, 2006), yang menegaskan bahwa adab dan tanggung jawab merupakan bagian penting dalam kepemimpinan

2. Nilai Amanah

Amanah merupakan nilai dasar dalam kepemimpinan Melayu yang menempatkan kekuasaan sebagai kepercayaan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Dalam pandangan Melayu, pemimpin bukan sekadar penguasa, melainkan pemegang amanah rakyat yang harus menjaga kesejahteraan bersama. Menurut Tenas Effendy (2004), “*pemimpin itu memegang amanah rakyat, salah langkah binasa negeri*”. Kutipan ini menegaskan bahwa amanah memiliki konsekuensi besar terhadap keberlangsungan masyarakat. Oleh karena itu, pemimpin dituntut bersikap jujur, adil, serta tidak menyalahgunakan kekuasaan.

3. Hubungan Timbal Balik antara Pemimpin dan Rakyat

Mengutip peribahasa “*raja adil raja disembah, raja zalim raja disanggah*” menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat. Penghormatan rakyat tidak muncul karena kekuasaan semata, tetapi karena sikap dan kebijakan pemimpin. Hal ini sejalan dengan pendapat Raja Ali Haji yang menyatakan bahwa “*raja yang adil itu menjadi payung kepada rakyatnya*” (Raja Ali Haji). Artinya, pemimpin yang baik akan melindungi dan menyejahterakan rakyat, sehingga mendapatkan kepercayaan dan dukungan

4. Penolakan terhadap Kezaliman

Budaya Melayu secara tegas menolak kezaliman dalam kepemimpinan. Pemimpin yang bertindak sewenang-wenang dianggap melanggar norma adat dan nilai kemanusiaan. Dalam ungkapan Melayu disebutkan,

“*raja zalim membawa bala, negeri rosak rakyat sengsara*” (Effendy, 2004).

Kutipan ini menunjukkan bahwa nasib rakyat sangat bergantung pada kualitas moral pemimpinnya. Dengan demikian, keadilan menjadi syarat utama dalam kepemimpinan Melayu. Seorang pemimpin dituntut untuk mampu bersikap adil dalam mengambil keputusan, tidak memihak, serta menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nilai ini sekaligus berfungsi sebagai pengingat bahwa kepemimpinan yang baik harus selalu berorientasi pada kesejahteraan rakyat,

sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. bahwa keadilan pemimpin akan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keadilan menjadi syarat utama dalam kepemimpinan

.5. Nilai Moral dan Etika

Kepemimpinan Melayu sangat menekankan pentingnya moral dan etika sebagai landasan utama dalam menjalankan kekuasaan. Seorang pemimpin ideal tidak hanya diukur dari keberhasilannya dalam mengatur pemerintahan, tetapi juga dari kualitas akhlak dan kepribadiannya. Nilai-nilai seperti kesantunan, kebijaksanaan, kejujuran, serta kemampuan menjaga sikap dalam kehidupan sehari-hari menjadi indikator penting dalam menilai seorang pemimpin. Dalam budaya Melayu, pemimpin dipandang sebagai cerminan masyarakat, sehingga perilaku dan tutur katanya harus mencerminkan nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan teladan. Mengutip peribahasa,

“cakap beralas, budi berlapik”

juga memperlihatkan pentingnya kesantunan dalam bertutur dan bertindak. Dalam konteks kepemimpinan, ungkapan ini mengandung makna bahwa setiap keputusan dan perkataan pemimpin harus dipertimbangkan dengan bijaksana serta dilandasi oleh etika yang baik. Hal ini penting agar pemimpin tidak menimbulkan konflik, melainkan mampu menciptakan suasana yang harmonis dan penuh rasa hormat dalam masyarakat.

6. Nilai Sosial dan Budaya

Nilai sosial dan budaya merupakan unsur penting dalam kepemimpinan Melayu karena mencerminkan cara pandang masyarakat terhadap hubungan antara pemimpin dan rakyat. Dalam budaya Melayu, kepemimpinan tidak hanya dipahami sebagai kekuasaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab sosial yang harus dijalankan dengan memperhatikan norma adat, nilai kemanusiaan, serta keharmonisan masyarakat. Peribahasa Melayu menjadi salah satu media utama dalam menyampaikan nilai-nilai tersebut secara turun-temurun. Salah satu peribahasa yang mencerminkan nilai sosial dalam kepemimpinan adalah “bulat air kerana pemetung, bulat manusia kerana muafakat”.

Peribahasa ini menegaskan bahwa kehidupan masyarakat yang harmonis hanya dapat terwujud melalui kesepakatan dan kerja sama. Dalam konteks kepemimpinan, pemimpin diharapkan mampu membangun hubungan yang baik dengan masyarakat serta

melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Melayu bersifat kolektif dan tidak otoriter.

4. KESIMPULAN

Peribahasa “raja adil raja disembah, raja zalim raja disanggah” merupakan representasi nilai-nilai fundamental dalam konsep kepemimpinan Melayu yang menempatkan keadilan sebagai prinsip utama. Dalam pandangan masyarakat Melayu, legitimasi seorang pemimpin tidak ditentukan oleh kekuasaan semata, melainkan oleh kemampuan dalam menjalankan amanah, bersikap adil, serta menjaga kesejahteraan rakyat. Nilai ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang ideal harus berorientasi pada kepentingan bersama dan dilandasi oleh tanggung jawab moral.

Selain itu, peribahasa tersebut juga menegaskan adanya hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat. Pemimpin yang adil akan memperoleh kepercayaan, penghormatan, dan dukungan, sedangkan pemimpin yang zalim akan menghadapi penolakan dari masyarakat. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat Melayu memiliki kesadaran kritis terhadap kekuasaan serta menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran dalam kehidupan sosial.

Dengan demikian, nilai-nilai kepemimpinan yang terkandung dalam peribahasa Melayu tetap relevan untuk diterapkan dalam konteks kehidupan modern. Prinsip keadilan, amanah, moral, dan musyawarah dapat menjadi landasan dalam membangun kepemimpinan yang berintegritas dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peribahasa Melayu tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan etika kepemimpinan di masa kini.

DAFTAR REFERENSI

- Aminnudin Saimon, & Muhammad Asyraf Md. Rashid. (2015). *Konsep Kepimpinan dalam Peribahasa Melayu*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Effendy, Tenas. (2004). *Tunjuk Ajar Melayu*. Pekanbaru: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu.
- Effendy, Tenas. (2006). *Pemimpin dalam Perspektif Budaya Melayu*. Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu Riau.
- Effendy, Tenas. (2013). *Kearifan Pemikiran Melayu*. Pekanbaru: Tenas Effendy Foundation.
- Hussain, Abdullah. (2007). *Kamus Istimewa Peribahasa Melayu*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Raja Ali Haji. (1847). *Tsamarat al-Muhimmah*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

- Maghfiroh, Daniatul, dkk. (2019). Kepemimpinan Melayu: Analisis terhadap Nilai dan Praktik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya*, 5(2), 45–58.
- Jurnal Dinamika Pemerintahan*. (2018). Budaya Melayu dalam Perspektif Kepemimpinan. *Jurnal Dinamika Pemerintahan budaya melayu*, 1(1), 1–10.
- Saimon, Aminnudin. (2016). Nilai Kepemimpinan dalam Peribahasa Melayu. *Jurnal Bahasa dan Budaya Melayu*, 8(1), 12–25.
- Rahman, Noor Azmi Abdul. (2014). Kepimpinan Berasaskan Nilai dalam Tradisi Melayu. *Jurnal Kepimpinan Pendidikan*, 2(3), 67–80.
- Zakaria, Ahmad. (2010). Nilai Moral dalam Peribahasa Melayu. *Jurnal Bahasa dan Budaya*, 12(1), 23–35.